PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Merdeka No. 3 Nganjuk 64412
Telp. (0358) 321284 Email : Bapenda@nganjukkab.go.id
Website : https://bapenda.nganjukkab.go.id/

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 17 /K/411.214/2025
TENTANG
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
BADAN PENDAPATANDAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

BUPATI NGANJUK

Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan panduan dalam upaya penguatan akuntabilitas kinerja secara terpadu dan terarah dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk, perlu disusun rencana aksi pencapaian kinerja;

b. Bahwa berdasarkan ketentuan lampiran I Bab II huruf R angka 1.b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reormai Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Emplementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun rencana aksi terhadap hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang belum ditindaklanjuti;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimasud pada huruf a dan b, perlu disusun rencana aksi pencapaiaan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Instansi Kinerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD dan Rencana Kerja SKPD;
12. Peraturan Daerah Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Nganjuk;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Aksi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat aksi atau kegiatan jadwal pelaksanaan dan out put atau keluaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada Tanggal 8-1-2025

An. BUPATI NGANJUK
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

SLAMET BASUKI, AP
Pembina Utama Muda/IV-c
NIP. 19750311 199311 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 17 /K/411.403/2025
TENTANG RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JADWAL PELAKSANAAN (TRIBULAN)				AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIBULAN)				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	Rp
			I	II	III	IV		I	II	III	IV					
1	Meningkatkan PAD	Prosentase kenaikan PAD				8%	Penyusunan Renja, RKA, DPA	√	√	√	√	Jumlah dokumen perencanaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20,475,000.00
2							Penyusunan LKJip, LKPJ, Evaluasi tribulan	√	√	√	√	Jumlah Dokumen Evaluasi disusun			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19,947,000.00
3							Pembayaran gaji dan Insentif	√	√	√	√	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan yang di susun		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13,078,936,929.00
4							Penyusunan laporan Keuangan	√				Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	8,464,600.00
5							Penyusunan Laporan Keuangan bulanan, semesteran dan laporan Tribulan	√	√	√	√	Jumlah laporan keuangan, bulanan, triwulan, semesteran Perangkat Daerah yang disusun			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	49,899,000.00
7							Melaksanakan administrasi Kepegawaian	√	√	√	√	Jumlah administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4,999,800.00
8							Pelaksanaan Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan		√			Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	269,999,950.00
9							Penyusunan buku Inventaris barang, persedian barang	√	√	√	√	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25,000,000.00

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JADWAL PELAKSANAAN (TRIBULAN)				AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIBULAN)				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	Rp
			I	II	III	IV		I	II	III	IV					
10							Penyediaan peralatan listrik	√	√	√	√	Jumlah peralatan dan perlengkapatan kantor yang tersediayang tersedia		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	159,998,700.00
12							Penyediaaan logistik kantor	√	√	√	√	jumlah logistik kantor yang tersedia			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79,999,602.00
13							Penyediaan cetak dan penggandaan	√	√	√	√	Jumlah barang cetakan dan lembar penggandaan			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	59,999,800.00
14							Penyediaan Surat kabar	√	√	√	√	Jumlah bahan bacaan yang tersedia			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,200,000.00
15							Penyediaan snack, minum untuk tamu	√	√	√	√	Jumlah fasilitas tamu yang tersedia			Fasilitasi Kunjungan Tamu	10,000,000.00
16							Rapat koordinasi dalam dan luar daerah dan penyediaan snak, makan, minum rapat	√	√	√	√	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	209,765,000.00
17							penataan arsip dinamis	√	√	√	√	Jumlah arsip yang didokumentasikan			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	74,999,700.00
18							Pengadaan peralatan dan mesin	√				Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	153,801,045.00
19							Penyediaan materai dan pengiriman surat	√	√	√	√	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,169,500.00
20							pembayaran listrik, tilpun,air dan internet	√	√	√	√	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	247,180,000.00
21							pembayaran clening servis, honorarium tenaga lepas	√	√	√	√	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang terbayar			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	674,774,700.00
22							Pemeliharaan kendaraan dinas, Penyediaan BBM, Her Kendaraan dinas	√	√	√	√	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dirawat		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	200,060,850.00

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JADWAL PELAKSANAAN (TRIBULAN)				AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIBULAN)				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	Rp
			I	II	III	IV		I	II	III	IV					
23							Pemeliharaan mebelaire	√	√	√	√	Jumlah Meubeleur yang dipelihara			Pemeliharaan Mebel	2,497,500.00
24							Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan kantor	√	√	√	√	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipeliharat			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62,560,000.00
25							Pemeliharaan Gedung	√	√	√	√	Jumlah gedung kantor yangterpelihara			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39,900,000.00
26							Pendataan potensi baru, penyusunan target Pendapatan	√	√	√	√	Jumlah Perencanaan pengelolaan pajak daerah yang dilaksanakan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pengelolaan pendapatan Daerah	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	150,000,000.00
							Melaksanakan penyusunan SOP					Jumlah dokumen hasil analisa Pajak daerah			Analisa dan Pengembangan Pajak	100,000,000.00
27							Melaksanakan penyuluhan	√	√	√	√	Jumlah pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak	350,000,000.00
28							Pencetakan SPPT, DHKP dan Blanko SPPT, DHKP	√	√	√	√	Jumlah sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah yang tersedia			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak	500,000,000.00
29							Melaksanakan Pendaftaran dan pendataan pajak daerah	√	√	√	√	Jumlah Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang dilaksanakan			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	450,000,000.00
30							Pemeliharaan Sim Pengelolaan Pajak	√	√	√	√	Jumlah Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah yang dilaksanakan			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	250,000,000.00
31							Melaksanakan penilaian PBB-P2 dan BPHTB	√	√	√	√	Jumlah Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB yang dilaksanakan)			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	75,000,000.00
32							Melaksanakan Penetapan Pajak	√	√	√	√	Jumlah Penetapan Pajak Daerah yang dilaksanakan			Penetapan Wajib Pajak Daerah	200,000,000.00

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JADWAL PELAKSANAAN (TRIBULAN)				AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIBULAN)				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	Rp
			I	II	III	IV		I	II	III	IV					
33							Melaksanakan pelayanan pajak daerah	√	√	√	√	Jumlah Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang dilaksanakan			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100,000,000.00
34							Pelaporan realisasi pajak, pemberian hadian barang utk WP,	√	√	√	√	Jumlah Pelaporan Pajak Daerah pajak yang dilaksanakan			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak	1,300,000,000.00
35							verifikasi piutang pajak, penagihan piutang pajak	√	√	√	√	Jumlah Capaian realisasi penagihan piutang Pajak Daerah			Penagihan Pajak Daerah	900,000,000.00
36							Penyelesaian permohonan keberatan, pengurangan dan pembatalan pajak	√	√	√	√	Jumlah permohonan keberatan, pengurangan dan pembatalan yang dilaksanakan			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	70,000,000.00
37							Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan Wajib Pajak	√	√	√	√	Jumlah Wajib Pajak yang patuh			Pengendalian, pemeriksaan dan Pengawasan pajak Daerah	370,000,000.00
37							Melaksanakan Elektronifikasi Transaksi PEMDA	√	√	√	√	Jumlah laporan perkembangan Elektronifikasi Transaksi PEMDA			Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	200,000,000.00

a.n. BUPATI NGANJUK
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

SLAMET BASUKI, A.P.
Pembina Utama Muda/IV-c
NIP. 19750311 199311 1 001